

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) PROV. JAWA TIMUR

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

a) Tujuan

Program ini bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM.

b) Sasaran

Meningkatnya Proporsi Usaha Mikro dan Kecil dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada UMKM.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif dengan total anggaran sebesar Rp. 21.282.100.000,00 dengan realisasi Rp. 20.260.289.914,00 (95,20%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan di sekitar industri hasil tembakau sebanyak 13.300 peserta.
- Terlaksananya penerbitan buletin lensa KUMKM (1500 Eksemplar setahun).
- Terlaksananya kegiatan pendampingan/konsultan Perguruan Tinggi dalam pengurusan Legalitas bagi UMKM sebanyak 300 UMKM.
- Terlaksananya pelayanan informasi publik dan penanganan pengaduan pemberdayaan KUMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Jatim (3 Layanan publik).

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Koperasi dan UMKM pada umumnya masih menghadapi berbagai masalah yang terkait iklim usaha yang kurang kondusif antara lain : ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perijinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, praktik bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat serta lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Upaya Pemecahan Masalah

Dengan otonomi daerah diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya dan dengan meningkatkan pelayanannya kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha baru semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan semakin berkembang.

b) Sasaran Program

Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Wirausaha Baru Yang Ditumbuhkan.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan total anggaran sebesar Rp. 25.576.346.000,00 dengan realisasi Rp. 24.764.305.704,00 (96,83%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Perkembangan keragaan koperasi wanita yang terbentuk di tahun 2010 dapat dilihat pada table berikut:

NO	URAIAN	TRIWULAN III TAHUN 2011	TRIWULAN IV TAHUN 2011	TREND (%)
1	Anggota	159.119	187.228	17,7
2	Pengurus	12.733	14.585	14,5
3	Pengawas	8.706	9.710	11,5
4	Karyawan	175	174	-0,6
5	Modal	118.900.000.000	118.900.000.000	0
6	Volume Pemberian Pinjaman	162.305.910.688	184.333.736.899	13,6
7	Perputaran Modal (Kali)	1	1,55	55
8	Pendapatan (Rp.)	9.738.879.024	17.990.632.734	84,7
9	Biaya (Rp.)	3.688.409.461	6.474.338.012	75,5
10	Shu (Rp.)	6.038.076.652	11.578.139.217	91,8

: Dinas Koperasi dan UMKM (Kelembagaan), 2011.

Selain itu beberapa hasil diantaranya :

- Terlaksananya kerjasama Perguruan Tinggi dalam inkubator bisnis bagi UMKM sebanyak 320 UMKM.
- Terlaksananya pemebrdayaan Koperasi usaha pertanian yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 520 orang (BSC 5 Angk. Analisa Lap. Keu. 6 Angk. Pemasaran Hasil Produk Koperasi Pertanian 2 Angk.)

- Terlaksananya pemberdayaan Koperasi usaha peternakan yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 160 orang (Biogas 4 Angk.)
- Terlaksananya pemberdayaan Koperasi usaha perikanan yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 280 orang (Hasil Pengolahan Ikan 4 Angk. Pemberdayaan Istri Nelayan 3 Angk.)
- Terlaksananya pemberdayaan Koperasi usaha perdagangan yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 320 orang (Penguatan Manajemen Ritel 8 Angk.)
- Terlaksananya pemberdayaan Koperasi usaha pertambangan dan industri yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 120 orang (Pengembangan Kemasan Hasil Produksi 3 Angk.)
- Terlaksananya pemberdayaan Koperasi usaha perkebunan yang mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 320 orang (Pengembangan Usaha Koperasi Daerah Hutan 4 Angk. Manajemen Usaha KPTR 4 Angk.)
- Terlaksananya kegiatan pendampingan konsultan/Perguruan Tinggi dalam HAKI bagi UMKM sebanyak 350 UMKM.
- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan KUMKM melalui Klinik KUMKM meliputi : kegiatan operasional 12 bulan, short course 24 angkatan, pendampingan konsultan UKM dalam pemberdayaan masyarakat/UMKM (24 angkatan).
- Terlaksananya pendampingan pengembangan kemitraan bagi kelompok petani tembakau sebanyak 40 paket kegiatan.
- Terlaksananya kegiatan pelatihan ketrampilan UMKM sebanyak 5.700 Peserta.
- Terlaksananya keterampilan produktif bagi usaha mikro dan kecil anggota koperasi wanita sebanyak 2.850 anggota kopwan dan tersalurkan bantuan sarana/peralatan stimulan praktek.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Wirausaha baru (pelaku UMKM) dalam permodalan sering dipenuhi lewat pinjaman baik dari tetangga maupun rentenir (bank titil) yang proses meminjamannya relatif tidak berbelit. Hal ini menunjukkan masih mahal biaya transaksi (transaction cost) pada institusi keuangan formal bagi para pelaku UMKM serta sulit mengakses teknologi informasi dan pemasaran.

Upaya Pemecahan Masalah

Dengan program KUR diharapkan Pelaku UMKM (Wirausaha Baru) mendapatkan tambahan modal kerja untuk usaha dan dengan jaminan dari pemerintah. Untuk mengakses sumber daya produktif teknologi informasi dan pasar dapat melalui pembentukan Klinik Koperasi yang diharapkan terbentuk di seluruh kabupaten dan kota.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi.

b) Sasaran

Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Usaha Kecil dan Menengah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Ekspor UKM Pada Total Ekspor Non Migas.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dengan total anggaran sebesar Rp. 24.184.200.000,00 dengan realisasi Rp 23.596.165.523,00 (97,57%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Perkembangan Keragaan KSP/USP Koperasi di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	2009	2010	2011
1	KSP/USP Koperasi	Kop	9.889	10.034	21.550
2	Anggota	Orang	5.525.585	5.564.252	3.685.099
3	Modal Sendiri	Rp. 000	2.229.987.507	2.296.815.827	7.881.801.971
4	Modal Luar	Rp. 000	1.555.737.475	1.571.299.850	7.281.756.871
5	Volume Pinjaman	Rp. 000	3.796.188.671	3.783.569.958	19.881.495.610
6	SHU	Rp. 000	229.980.000	232.078.810	1.150.629.534
7	Total Asset	Rp. 000	4.072.924.439	3.996.120.721	14.727.732.119

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jatim (FP-USP)

Selain itu beberapa hasil program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya kegiatan operasionalisasi pengelolaan Gedung Pamer dan Gedung Souvenir Jatim dalam kurun waktu 1 tahun (12 bulan).
- Terlaksananya Bimtek Metode Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian KSP/USP - Koperasi di Jatim 75 orang, Bintek SKKNI bagi Pengelola KSP/USP- Koperasi dan KJKS/UJKS di Jatim sejumlah 125 orang, Bintek Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dekopin sebagai pembina KSP/USP - Koperasi dan KJKS/UJKS - Koperasi di Jatim sejumlah 125 orang, Bintek Pelayanan Prima (Service Exelent) Bagi Pengelola KSP/USP - Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di Jatim sejumlah 75 orang, Bintek Manajemen Bisnis Bagi Pengelola Koperasi Pemuda pada sektor USP Koperasi Di Jatim sejumlah 50 orang, Bintek Manajemen Bisnis Bagi Pengelola Koperasi Wanita pada sektor USP Koperasi Di Jatim sejumlah 50 orang, Bimbingan Teknis SKKNI (Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi Pengelola KSP/USP Koperasi

50 orang, Bimbingan Teknis Manajemen Koperasi bagi Kelompok Usaha sejumlah 816 orang.

- Terlaksananya Pelatihan Sosialisasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi KSP/USP - Koperasi sejumlah 76 orang, Inputing Data Keragaan KSP/USP Binaan Provinsi, Lintas Kab/Kota dan 5 Wilayah.
- Terlaksananya kegiatan pendampingan pengelolaan modal bagi KPEL sebanyak 4 Paket kegiatan.
- Terlaksananya kegiatan promosi produk UMKM melalui event pameran di dalam maupun luar negeri.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM terutama usaha skala mikro adalah rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku UMKM dan usaha besar. Mayoritas UMKM memiliki omzet yang rendah dan hampir seluruhnya berusaha dengan modal sendiri. Mayoritas pemilik UMKM berpendidikan SMP/Madrasah Tsanawiyah ke bawah. Dengan kondisi seperti itu, kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran serta kompetensi kewirausahaannya relatif rendah.

Upaya Pemecahan Masalah

Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan pendapatan, antar daerah termasuk penanggulangan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan daya saing. Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, modal, pasar,

teknologi dan informasi termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

b) Sasaran

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Organisasi Koperasi Sesuai Jati Diri Koperasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Koperasi Aktif, Persentase Pelaksanaan RAT, Persentase KSP/USP Yang Berkategori Sehat, Persentase Penilaian KSP/USP.

c) Pagu dan Realisasi Program

Program ini didukung oleh 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 14.950.000.000,00 dengan realisasi Rp. 14.348.639.721,00 (95,98%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Selama tahun 2011 kegiatan klinik KUMKM telah melaksanakan kegiatan sbb:

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH YANG BERKONSULTASI	JUMLAH PERMASALAHAN	MASALAH YANG SUDAH DISELESAIKAN	MASALAH YANG BELUM DISELESAIKAN
1	KONSULTASI BISNIS	3380	3380	3634	246
2	INFORMASI BISNIS	3380	3380	3634	246

3	ADVOKASI & PENDAMPINGAN	132	132	72	60
4	SHORT COURSE	1679	1679	1611	68
5	AKSES PEMBIAYAAN	132	132	72	60
6	AKSES PEMASARAN	114	114	94	20
7	PUSAT PUSTAKA ENTERPRENEURSHIP	983	983	983	-
8	MOBIL KLINIK UMKM	-	-	-	-
9	IT ENTERPRENEUR	383	383	345	383
10	TV UKM ONLINE	-	-	-	-

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM (UMKM), 2011.

Selain di atas beberapa hasil program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pemeringkatan Koperasi sebanyak 70 koperasi.
- Terlaksananya Apresiasi koperasi berprestasi sebanyak 300 Koperasi.
- Terlaksananya Penataan dan Penertiban kantor Cabang koperasi sebanyak 50 Koperasi
- Terlaksananya Restrukturisasi Lintas pelaku pendirian Badan hukum Koperasi (sebanyak 250 koperasi).
- Terlaksananya Penataan dan Penguatan Organisasi dan tatalaksana koperasi (600 Koperasi).
- Terlaksananya Penertiban dan Pengawasan lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas (1.500 koperasi).
- Terlaksananya pelatihan kompetensi pengelola koperasi dan UMKM sebanyak 360 orang peserta.
- Terlaksananya penyempurnaan media pembelajaran Diklat KUMKM sebanyak 8 modul Diklat.
- Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi koperasi sebanyak 800 Koperasi.
- Terlaksananya Perkuatan Peran Dekopin dalam Penguatan Ideologi Koperasi (38 dekopinda).

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Banyak koperasi yang terbentuk tanpa disadari adanya kebutuhan atau kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggotanya sehingga kehilangan jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri. Banyak koperasi yang tidak dikelola secara profesional menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya sebuah badan usaha dan masih terdapat kebijakan dan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi. Koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi.

Upaya Pemecahan Masalah

Diharapkan dengan membuat standar seperti persentase koperasi aktif, persentase pelaksanaan RAT, persentase KSP/USP yang berkategori sehat dan persentase penilaian KSP/USP dengan mendasari pada peraturan yang ada akan membuat koperasi bisa mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik

5) Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

a) Tujuan

Program ini adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal berskala mikro, terutama ditujukan bagi keluarga miskin dan korban PHK, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

b) Sasaran

Meningkatnya Nilai Tambah UMKM Terhadap PDRB dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kontribusi UMKM pada PDRB

c) Pagu dan Realisasi Program

Program ini didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 37.887.354.000,00 dengan realisasi Rp. 34.394.808.584,00 (90,78%) yang secara rinci realisasi anggaran serta indikator, target dan realisasi kinerja per kegiatannya dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

KERAGAAN USAHA KOPERASI SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PER TRIWULAN IV TAHUN 2011

NO	KAB/KOTA	SEKTOR		
		Pertanian	Perkebunan	Kehutanan
1	KOTA SURABAYA	7	-	-
2	KAB. GRESIK	20	-	-
3	KAB. SIDOARJO	23	10	-
4	KAB. MOJOKERTO	31	17	10
5	KOTA MOJOKERTO	2	-	-
6	KAB. JOMBANG	28	-	10
7	KAB. BOJONEGORO	27	-	19
8	KAB. LAMONGAN	31	-	6
9	KAB. TUBAN	23	-	41
10	KAB. SUMENEP	12	-	-
11	KAB. PAMEKASAN	14	-	-
12	KAB. SAMPANG	23	-	-
13	KAB. BANGKALAN	22	-	-
14	KAB. KEDIRI	29	-	10
15	KOTA KEDIRI	6	-	-
16	KAB. TULUNGAGUNG	23	-	-
17	KAB. TRENGGALEK	15	-	-
18	KAB. NGANJUK	22	2	-
19	KAB. BLITAR	38	2	-
20	KOTA BLITAR	2	-	-
21	KAB. MALANG	37	52	-
22	KOTA MALANG	4	2	-
23	KOTA BATU	-	-	-
24	KAB. PASURUAN	28	-	-

25	KOTA PASURUAN	3	-	-
26	KAB. PROBOLINGGO	31	-	-
27	KOTA PROBOLINGGO	2	-	-
28	KAB. LUMAJANG	30	5	-
29	KAB. MAGETAN	16	2	-
30	KOTA MADIUN	2	-	-
31	KAB. PACITAN	13	-	-
32	KAB. PONOROGO	27	1	13
33	KAB. NGAWI	33	-	-
34	KAB. MADIUN	22	3	-
35	KAB. BONDOWOSO	25	9	-
36	KAB. BANYUWANGI	45	-	-
37	KAB. SITUBONDO	23	5	-
38	KAB. JEMBER	51	1	16
TOTAL		790	111	135

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM (Usaha), 2011.

Selain di atas beberapa hasil program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya pemberian bantuan perkuatan permodalan koperasi wanita yang memiliki kinerja baik dari 3.750 kopwan diseleksi sebanyak 1.000 kopwan @ Rp 25 juta.
- Terlaksananya pemberdayaan kelompok nelayan di TPI dengan pemberian bantuan sosial sejumlah 25 kelompok @ 50 juta dan bimbingan teknis sebanyak 240 orang.
- Terlaksananya kegiatan pendampingan pemberdayaan sentra UMKM (38 Kab/Kota) dan visualisasi potensi OVOP (38 Kab/Kota)
- Terlaksananya pemberdayaan kelompok ekonomi produktif yang diberi bantuan pemodalannya sejumlah 50 kelompok dan sosialisasi penguatan LKM Bukan Bank Bukan Koperasi sebanyak 1.500 LKM
- Terselurkannya bantuan sosial kelompok usaha mikro PKL sebanyak 38 kelompok PKL
- Terselurkannya bantuan stimulan untuk 2000 peternak dan bimbingan teknis 50 angkatan

- Tersalurkannya pemberian bantuan stimulan bagi 3.142 RTSM di 29 Kab di Jatim.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi masalah akses terhadap sumber daya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, pelaku UMKM hampir semuanya menggunakan modal sendiri. Kalaupun ada kucuran kredit, sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk investasi sangat terbatas. Pelaku UMKM menghadapi kesulitan memenuhi persyaratan pinjaman seperti agunan, meski usaha mereka layak. Keadaan seperti itu membuat UMKM sulit meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang bersaing. Penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai termasuk kemasan yang digunakan.

Upaya Pemecahan Masalah

Dengan memberikan stimulan perkuatan permodalan melalui skim pembiayaan yang menguntungkan pelaku UMKM dan disertai peningkatan skill (keahlian) terutama penguasaan teknologi informasi, manajemen dan proses produksi serta pemasaran yang terintegrasi diharapkan kapasitas usaha UMKM semakin bertambah besar dan baik sehingga bisa tumbuh mandiri dan bersaing.